ABSTRAK

Nama   : Heru Setiawan

Program Studi : Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik

Judul   : Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Sistem Teknologi
Informasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara *online*, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi *video conference*.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK.

Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media *online*, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK.

Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, *website* MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang

ABSTRACTION

Name   : Heru Setiawan

Study Program: Postgraduate program in Administration and Public Policy

Title   : An Evaluation on The Implementation of Information Technology
System Procurement Policy in The Constitutional Court of The
Republic of Indonesia

This thesis elaborates an evaluation towards the policy for information technology system procurement in The Constitutional Court. The research is aimed at knowing the level of success in the implementation of information technology system procurement policy in The Constitutional Court in providing support to Court's activities. As a judicial institution with its vision and mission to be a modern and legitimate court, the research tries to discover how far the policy support in information technology system procurement within The Constitutional Court becomes the solution in providing Indonesian people with access to the court. The access are implemented through information on court schedule, court's transcription, court's ruling, online case registration, and long-distant trial system through video conference.

The research is carried out by using descriptive research method with qualitative approach focusing on the study of six research indicators as mentioned by William N. Dunn (2003: 429-438), namely, effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, responsivity, and accuracy. The sources for interviews are from the officials and the staffs of the Constitutional Court, namely, The Secretary General, Chief of Protocol and Public Relation Bureau, Head of Procurement Service Unit and a staff of IT division.

From the process of information discovery through interviews and secondary source data also documentation archieve from printed and online media, it can be concluded that the Procurement for IT System in The Constitutional Court has been implemented effectively, efficiently and punctually. The policy for the procurement of IT System within the Constitutional Court has met the sufficiency aspect of the demand in the Constitutional Court's activities. The policy for procuring IT system in The Constitutional Court has improved the service to public in providing easy access for people to the judicial activities in the court, and such policy has been responded by the people in form of 22 (twenty-two) cases registered online and 17 (seventeen) long-distant trials has been carried out in the dispute over 2009 election result cases in the Constitutional Court.

Of the advice to be given as an evaluation to the implementation of IT System Procurement Policy in The Constitutional Court is that the policy has been a solution especially in providing easy access to the people to the Court's trials. The support to IT System ought to be consistently carried out and socialized to the the people through available channels, printed media, electronic media, The Court's official website, Court's television and radio programs. As further advice, the

mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.

Kata kunci:

evaluasi, implementasi, teknologi informasi

officers' competence within the IT system area have to be improved, and there ought to be continual maintenance of the equipment and there ought to be adjustment to the global development of IT system. Hence, the support in the implementation of the policy can always provide easy access for the people to the trials in the modern and legitimate Constitutional Court.

Keywords:

evaluation, implementation, information, technology